

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIBENTUK PERATURAN BUPATI YANG  
MENGATUR TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN  
TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
(Tinjauan Yuridis Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten  
Lembata Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)**

**JURNAL**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan  
(M.Kn.)



**Oleh**

**KAMALUDIN LIPA LEBU**

**Nim: 1360 10200 1111 20**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2016**

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIBENTUK PERATURAN BUPATI  
YANG MENGATUR TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA  
LAPANGAN TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN**

(Tinjauan Yuridis Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah  
Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah)  
Kamaludin Lipa Lebu<sup>1</sup>, Dr. Sihabudin, S.H., M.H.<sup>2</sup>, Dr. Moh. Fadli, S.H.,  
M. Hum.<sup>3</sup>

**Abstract**

*Tax on Acquisition of Land and Buildings, hereinafter referred BPHTB is one type of Local Tax is a tax on acquisition of land and / or buildings. The purpose of the collection BPHTB improve the reception area and hopes to cover the needs of regional spending. The fact that occurred in the district government has not formed a decree governing the examination of BPHTB as provided in Article 87 Paragraph (4) and (5) the district Regional Regulation No. 2 of 2011 on Local Taxes. As a result, provide opportunities for taxpayers who are not acting in good faith toying with the transaction price and the market price as well as allow it to cooperate with officers from the relevant authorities of fraud in the collection of BPHTB. This situation clearly gives loss to the district government in increasing local revenue. So were interested to examine the legal issues.*

*The method used for this study is a normative legal research. Normative legal research approach law (statute approach) for reviewing legislation. While the conceptual approach (conceptual approach) in order to produce the concept of improvement. Next is an analytical approach (analytical approach) is to analyze the regulations to build and provide legal arguments on legal issues studied.*

*Based on the research required to establish district head decree to fill legal vacuums in Article 87 Paragraph (4) and (5) the district Regional Regulation No. 2 of 2011 on Local Taxes. Thus creating legal certainty and legal justice, harmonization and synchronization in the implementation of the regulations on the Field Inspections BPHTB.*

*The suggestion of writing a thesis by author is therefore not the establishment of the decree law then in filling the void that is doing discretion.*

**Key word:** *simple examination courses bphbt, emptiness law*

**Abstrak**

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB adalah salah satu jenis Pajak Daerah adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tujuan dari pemungutan BPHTB adalah meningkatkan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

penerimaan daerah dan harapannya dapat menutup kebutuhan pengeluaran daerah. Kenyataan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Lembata belum membentuk Peraturan Bupati yang mengatur Pemeriksaan terhadap BPHTB seperti yang ditentukan Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Akibatnya memberi peluang bagi Wajib Pajak yang tidak beritikad baik mempermainkan harga transaksi dan harga pasar serta memungkinkan untuk bekerjasama dengan oknum dari instansi terkait melakukan penggelapan dalam pemungutan BPHTB. Keadaan ini jelas memberi kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti persoalan hukum ini.

Metode yang digunakan untuk Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menghasilkan konsep perbaikan. Selanjutnya adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah menganalisis peraturan untuk membangun dan memberikan argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian maka Bupati Lembata wajib membentuk Peraturan Bupati guna mengisi Kekosongan hukum pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum, harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan peraturan tentang Pemeriksaan Lapangan terhadap BPHTB.

Saran dari penulisan tesis oleh Penulis adalah oleh karena belum dibentuknya Peraturan Bupati maka dalam mengisi kekosongan hukum tersebut adalah melakukan diskresi.

**Kata Kunci:** pemeriksaan sederhana lapangan bphtb, kekosongan hukum

## Latar Belakang

Lingkup kehidupan manusia adalah hidup bersama-sama dalam masyarakat yang untuk tataran lebih besar akan terjelma ke dalam suatu organisasi yang disebut Negara. Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk, satu diantaranya adalah pajak.<sup>4</sup>

Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan, mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.<sup>5</sup>

Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat 2 (dua) kelompok pajak terkait dengan lembaga yang berwenang melakukan pemungutan pajak, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pembagian pajak ini terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan/penerimaan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian Pemerintah Daerah dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap tingkatan pemerintahan tersebut diatas hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.<sup>6</sup>

Bab penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan: Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan dalam rangka menyelenggarakan roda pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan masing-masing dari daerah provinsi terdiri atas

---

<sup>4</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi terbaru, cetakan 1, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm. 2.

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 2.

<sup>6</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Material*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. vii.

daerah-daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah tersebut kemudian mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat daerah, dan untuk itu daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, baik berupa pungutan yang bersifat pajak daerah maupun retribusi daerah.<sup>7</sup>

Kenyataan yang terjadi dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ini belum memadai dan hanya berperan kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sehingga tidak jarang sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari sumber alokasi dana dari pusat, dan dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah, berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah<sup>8</sup>, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif, berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, untuk selanjutnya disebut BPHTB.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur perluasan terhadap beberapa jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB, yang sebelumnya merupakan pajak pemerintah pusat menjadi pajak daerah, tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dan harapannya dapat menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu dalam suatu

---

<sup>7</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049.

<sup>8</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438.

norma yang mengatur tentang pajak harus ada kepastian hukumnya sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda, apa lagi sampai dengan terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan BPHTB.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah salah satu jenis Pajak Daerah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. BPHTB yang menganut prinsip *Self assessment system* menentukan bahwa wewenang ada di Wajib Pajak, keaktifan ada di Wajib Pajak, dan *fiscus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Akan tetapi pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang menentukan adanya Pemeriksaan Lapangan sebagai konsekuensi dari penerapan *Self assessment system* itu sendiri yaitu menguji kepatuhan dari Wajib Pajak.

Seperti halnya yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum memiliki Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan lapangan terhadap BPHTB. Pemeriksaan sederhana lapangan terhadap BPHTB yang belum diatur ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Lembata sendiri benar menerapkan *Self assessment system* yaitu pada sistem ini menentukan bahwa wewenang ada di Wajib Pajak, keaktifan ada di Wajib Pajak, dan *fiscus* yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tidak ikut campur dan hanya mengawasi Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan disisi lain murninya penerapan *self assessment system* ini jelas menjadi bumerang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri karena ketika Wajib Pajak yang tidak beritikad baik dan mempermainkan harga transaksi dan harga pasar dilaporkan lebih kecil dari sebenarnya guna menghindari PPH dan BPHTB maka yang rugi adalah Pemerintah Kabupaten Lembata sendiri.

BPHTB sendiri diatur dalam Pasal (58) sampai dengan Pasal (62) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pasal 87 Ayat (4) Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan: *“Jika ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan data basis pajak yang dimiliki Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.”*

Pasal 87 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tersebut di atas sesungguhnya justru menimbulkan kekosongan hukum, karena pemeriksaan sederhana lapangan di Kabupaten Lembata sendiri belum diatur dalam Peraturan Bupati seperti yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Pasal 87 Ayat (5) sebagai berikut: *“ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan pemeriksaan Pajak di atur dengan Peraturan Bupati”*.

Pasal 87 Ayat (5) tersebut di atas jelas menentukan dan mengamanatkan serta mewajibkan kepada Bupati Lembata untuk membentuk aturan pelaksana dari Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut, karena jika tidak dibentuk aturannya maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata yang selaku Pihak yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan sederhana lapangan ini tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan permasalahan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, terdapat permasalahan hukum normatif yaitu adanya kekosongan hukum, karena aturan yang mengatur tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan di Kabupaten Lembata belum diatur dalam Peraturan Bupati seperti yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Pasal 87 Ayat (5) dan Pemerintah Kabupaten Lembata yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak mempunyai payung hukum atau dasar hukum untuk melakukan verifikasi lapangan, hal ini jelas berpengaruh pada kerugian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sendiri dalam pemungutan pajak sebagai salah satu pemasukan daerah. Oleh karenanya penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM TIDAK DIBENTUK PERATURAN BUPATI YANG MENGATUR TENTANG**

PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (Tinjauan Yuridis Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah).”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Mengacu pada penelitian hukum normatif tersebut, maka kemudian penulis dapat merumuskan beberapa masalah yakni apa akibat hukumnya jika penelitian dan pemeriksaan sederhana lapangan itu tidak dibentuk dalam peraturan bupati dan tindakan hukum apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lembata terhadap Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?

### **Pembahasan**

#### **A. Akibat Hukum Jika Pemeriksaan Sederhana Lapangan Terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tidak Dibentuk Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lembata**

Hak dan kewajiban di dalam ilmu hukum tidak dapat dipisahkan. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Isi hak dan kewajiban itu ditentukan oleh aturan hukum. Aturan hukum itu terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Dengan demikian peristiwa hukum adalah peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum.<sup>9</sup>

Menurut Saut P. Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan (bersifat fakultatif), sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan (bersifat imperatif)<sup>10</sup>. Hak dan kewajiban merupakan

---

<sup>9</sup> Ishaq, S.H., M.Hum., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan ke dua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 77.

<sup>10</sup> Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 81.



kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Salah satu wujud dari akibat hukum adalah lahirnya sanksi jika dilakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>11</sup>

Sebagai langkah kongkrit untuk mewadahi hak dan kewajiban dari subjek hukum atau lebih tersebut di atas maka tentunya dibutuhkan adanya produk hukum daerah baik yang bersifat mengatur ataupun bersifat penetapan agar penyelenggaraan otonomi daerah diberikan kewenangan tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang disertai dengan hak dan kewajiban yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang baik.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang menentukan bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk pengelolaan pendapatan asli daerah, sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah yang sebagian besar itu, menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, sehingga bisa menciptakan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Berkaitan dengan pelimpahan wewenang ini, peran dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangnya haruslah strategis, khususnya dalam membentuk peraturan daerahnya dan peraturan daerah lainnya haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di Daerah serta dalam melaksanakan kebijakannya pun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan guna terciptanya kepastian hukum bagi masyarakatnya.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 82-87.

Skema dari penyelenggaraan pemerintah telah terjadi pergeseran dari *rule government* menjadi *good governance*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk pembangunan publik dan pelayanan kepada publik atau masyarakat luas dalam perspektif *good governance* tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah saja (*governance*) atau negara (*state*) saja, tetapi wajib melibatkan masyarakat dan seluruh komponen baik masyarakat luas atau pemerintah (birokrat) yang dua hal ini harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya.<sup>12</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Lembata membentuk dan menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang pada Bab X mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara umum di wilayah Kabupaten Lembata.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata adalah salah satu sub administrasi publik yang mengelolah keuangan dari pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Lembata guna membiayai pembangunan di daerah Kabupaten Lembata itu sendiri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dengan mengukur besarnya kemampuan pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata adalah Pajak dan Retribusi Daerah serta hasil usaha daerah sendiri yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada bagian menimbang yaitu: “*Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah*”.

---

<sup>12</sup> Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan*, (Malang: Setara Pers, 2011), hlm. 2.

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Lembata merupakan kewajiban bayar pajak dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang hingga saat ini mengelolah penerimaan pajaknya di sembilan (9) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nagawutun, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, Kecamatan Wulandoni.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah menentukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB sebagai Pajak Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan harapan nya dapat menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata yang telah diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak daerahnya berdasarkan aturan perundang-undangan adalah diantaranya mempunyai kewenangan terhadap pemungutan BPHTB.

Dasar hukum pengaturan tentang BPHTB di Kabupaten Lembata adalah pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB di Kabupaten Lembata. Dengan adanya 2 (dua) peraturan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lembata berhak melakukan pemungutan terhadap BPHTB yang selanjutnya di limpahkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BPHTB yang menganut Sistem Self Assessment. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini pun dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sesuai dengan Penjelasan Pasal 56 Ayat (3) yaitu:

“Yang dimaksud dengan BPHTB terutang dibayar oleh Wajib Pajak dengan tidak berdasarkan pada adanya surat ketetapan pajak adalah sistem pemungutan BPHTB adalah self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.”

Sistem pemungutan terhadap BPHTB di Kabupaten Lembata benar-benar menerapkan sistem pemungutan Self Assessment Sistem, artinya Wajib Pajak benar-benar diberi kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang yaitu baik dalam menghitung dan membayar sendiri dengan Surat SSPD-BPHTB (Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Sebagai salah satu mekanisme penegak hukum atas *self assessment system*, Direktur Jendral Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang<sup>13</sup>, yang menyatakan bahwa Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian pemeriksaan pajak merupakan sebuah mekanisme pengendalian/kontrol dalam *self assessment system* untuk memastikan dan menjaga agar Wajib Pajak bersedia menyampaikan SPT nya dengan benar, lengkap dan jelas.<sup>14</sup>

BPHTB sendiri diatur dalam Bab X pada Pasal (58) sampai dengan Pasal (62) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pasal 87 Ayat (4) Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan: “Jika ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan data basis pajak yang dimiliki Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.”

Pasal 87 Ayat (5) tersebut di atas jelas menentukan dan mengamanatkan serta mewajibkan kepada Bupati Lembata untuk membentuk aturan pelaksana atau regulasi dari Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut,

---

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

<sup>14</sup> Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono, *Pemeriksaan Pajak*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 31.

karena jika tidak dibentuk aturannya maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata yang selaku Pihak yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan sederhana lapangan ini tidak memiliki dasar hukum tidak terciptanya kepastian hukum dalam melakukan pemungutan dari hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap BPHTB.

Persoalan hukum yang terjadi di Kabupaten Lembata ini adalah terjadinya kekosongan hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 87 Ayat (4) dan (5) yang tidak melaksanakan amanat dari Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan yang mengatur tentang pemungutan BPHTB ini sudah ada tetapi tidak memadai dikarenakan belum ada regulasi dari Perda tersebut sebagai aturan pelaksanaannya, artinya belum dibentuknya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan bagi Wajib Pajak itu sendiri dalam hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap BPHTB.

Para magistrat (pejabat hukum; pengemban kewenangan hukum) yang menjalankan fungsi-fungsinya, dengan ini, dituntut untuk mengutamakan dua unsur tersebut di atas. Ini berarti bahwa ia akan membentuk dan mengekan hukum-hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran, dengan mengacu pada nalar dan membebaskan dirinya dari nafsu dan keserakahan. Bila ini dapat diaplikasikan dengan benar, maka hukum akan dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen yang mendidik orang agar berperilaku tidak menyimpang (baik), dan ini akan melatih mereka untuk memberi sumbangsih ke dalam kemaslahatan dalam konteks kebersamaan.<sup>15</sup>

Keberlakuan hukum sebagai suatu tameng terdepan dalam mewujudkan hukum yang tepat, jelas, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaannya dan tidak ada intervensi atau pengaruh dari luar hukum. Kepastian hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>15</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 177.

pada Ayat (1) Pasal 28 D yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*<sup>16</sup>

Abdul Rachmad Budiono yang di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa kepastian hukum bukan merupakan tujuan hukum melainkan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak diciptakan. Indikator adanya kepastian hukum suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.<sup>17</sup>

Adapun pendapat dari Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa kepastian hukum mengharuskan diciptakannya kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan yang dibentuk guna menciptakan suasana yang aman dan tentram di lingkungan masyarakat. Ada beberapa bagian dari kepastian hukum dapat dicapai dengan situasi tertentu yakni:

1. Telah tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, mudah diperoleh (accessible) dan konsisten;
2. Lembaga pemerintah (penguasa) menerapkan aturan-aturan yang telah dibuatnya tersebut dengan konsisten dan tunduk;
3. Masyarakat secara prinsip harus menyesuaikan dengan aturan-aturan hukum tersebut;
4. Di dalam peradilan hakim tidak berpihak terhadap penerapan aturan-aturan hukum dan harus menerapkan secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa;

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat (1) Pasal 28 D.

<sup>17</sup> Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing 2005), hlm. 22.

5. Pelaksanaan pengadilan harus secara kongkrit diterapkan dengan konsisten.

Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap BPHTB pada Pemerintah Kabupaten Lembata yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini justru menimbulkan kekosongan hukum sehingga dalam pelaksanaannya tidak memberi dasar hukum pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan dan juga tidak memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang diperiksa.

Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap BPHTB pada Pemerintah Kabupaten Lembata yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini pun jelas menunjukan tidak konsisten nya Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menjalankan apa yang menjadi amanat dari Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Pemerintah Kabupaten Lembata membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) yang hal ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 tentang keseragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan peraturan daerah lainnya sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum ini peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya harus memenuhi syarat-syarat

---

<sup>18</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049.

tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan asas dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan tersinkronnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun secara hierarkis, menetapkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan seperti yang termuat dalam Ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yaitu:<sup>19</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi dan;
6. Peraturan Daerah atau Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada Ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang seharusnya Pemerintah Kabupaten Lembata dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena posisi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Daerah atau Kabupaten/Kota.

---

<sup>19</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.



Terjadinya kekosongan hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang tidak menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat dalam Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan: *ayat (4) “Jika ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan data basis pajak yang dimiliki Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati”* Dan Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menentukan: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah”*.

Merugulasikan relasi-relasi hukum, “suatu standar yang umum” mengenai” pemulihan” atau tebusan” atas beragam konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku tertentu, menuntut untuk ditemukan, tanpa lagi menaruh respek kepada orang-orang, dan untuk aksi-aksi dan objek-objek yang dimaksudkan itu harus diukur dengan suatu “standar yang objektif”, bahwa:<sup>20</sup>

- a. Penerapan hukuman (sanksi) dalam cara-cara yang pasti, akan menebus tiap kejahatan pidana,
- b. Restitusi akan menebus tiap-tiap kerugian yang timbul akibat wanprestasi,
- c. Hal kerugian dan kerusakan secara ekonomi yang timbul lantaran suatu perbuatan harus dipulihkan dengan mengambil tindakan-tindakan yang akan membawa keuntungan (untuk menutupi kerugian).

Ketentuan pada Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jelas mengamanatkan Kepada setiap daerah untuk membentuk Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap BPHTB. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) yaitu pada Ayat (5) pun jelas menentukan

---

<sup>20</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, op.cit., hlm. 183.

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati, akan tetapi dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Lembata belum memiliki Peraturan Bupati nya sebagai aturan yang mengatur tentang verifikasi lapangan, karena jika tidak demikian maka berdampak pada penggelapan pajak oleh Wajib Pajak yang tidak beritikad baik mempermainkan harga transaksi dan harga pasar yang dilaporkan lebih kecil dari sebenarnya sehingga yang rugi adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.

Pemerintah Kabupaten Lembata yang dalam hal ini Bupati Lembata harusnya membentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemeriksaan Lapangan terhadap BPHTB agar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai payung hukum atau dasar hukum dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melakukan pemungutan terhadap BPHTB. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menentukan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah”.

Murninya penerapan *self assessment system* yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Lembata jelas menjadi bumerang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri yang belum memiliki peraturan yang mengatur tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap BPHTB karena ketika Wajib Pajak yang tidak beritikad baik dapat mempermainkan harga transaksi dan harga pasar yang dilaporkan lebih kecil dari sebenarnya guna menghindari PPH dan BPHTB maka yang rugi adalah Pemerintah Kabupaten Lembata sendiri dalam pemungutan BPHTB sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Sumber dana yang diperoleh dari pemungutan BPHTB ini lah yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Lembata guna membiayai pembangunan di daerah Kabupaten Lembata itu sendiri.

Akibat hukum tidak dibentuknya Peraturan Bupati dalam Pemeriksaan Lapangan seperti yang diamanatkan pada Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah Wajib Pajak yang tidak

beritikad baik dalam mempermainkan harga transaksi dan harga pasar yang dilaporkan lebih kecil dari sebenarnya serta memungkinkan untuk bekerjasama dengan oknum dari instansi terkait yang tidak beritikad baik melakukan penggelapan atau memanipulasi data dalam pemungutan BPHTB adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu perlu dibentuknya peraturan bupati dalam pemeriksaan sederhana lapangan sebagai upaya untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Ketika Wajib Pajak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan tidak sengaja karena kealpaannya maka dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**B. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Terhadap Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Dalam Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah**

Penegakan dan penerapan hukum tentang Pemeriksaan Lapangan di Kabupaten Lembata terhadap BPHTB mendapat kendala karena belum dibentuknya peraturan yang mengatur tentang Pemeriksaan Lapangan, hal ini menjadikan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memiliki dasar hukum dalam penegakan pemungutan BPHTB.

Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata adalah masih belum terciptanya aturan yang baik. Terjadi kekosongan hukum atau norma dalam Peraturan Daerah dengan Undang-Undang justru menjadi hal yang serius dalam penegakan hukum itu sendiri.

Pemeriksaan Lapangan terhadap BPHTB di Kabupaten Lembata yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini justru menimbulkan kekosongan hukum. Karena pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan bahwa Pemeriksaan Lapangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Sedangkan pada Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) ini pun

menentukan demikian, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Lapangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut sudah seharusnya Bupati Kabupaten Lembata membentuk Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan Lapangan terhadap BPHTB.

Kekosongan hukum dalam Pasal 87 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini jelas memberi peluang bagi Wajib Pajak yang tidak beritikad baik dapat mempermainkan harga transaksi dan harga pasar dan memungkinkan untuk bekerjasama dengan oknum dari instansi terkait melakukan pemungutan terhadap BPHTB. Untuk itu Bupati yang sudah ditentukan kewajibannya dalam Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah membentuk kebijakan yang mengatur tentang Pemeriksaan Lapangan guna Instansi terkait yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Lapangan, guna menguji kepatuhan dari Wajib Pajak.

Perlunya dibentuk peraturan tentang Pemeriksaan Lapangan oleh Bupati Kabupaten Lembata yang sebagai pemegang kekuasaan legislatif ini adalah untuk memberikan dasar hukum kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan, guna menguji kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri dalam pemungutan BPHTB yang sebagai konsekuensi dari penerapan self assessment system seperti yang ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>21</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU KUP dinyatakan bahwa pemeriksaan memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Menguji kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- b. Tujuan lain yang meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sangat penting dan merupakan salah satu asas penting dalam suatu negara hukum. Asas kepastian hukum menghendaki konsistensi hukum dalam penyelenggaraan hukum di suatu negara. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum akan terwujud dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Pemeriksaan Lapangan yang belum diatur oleh Bupati Kabupaten Lembata ini jelas tidak memberi kepastian hukum bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena tidak ada payung hukum dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan. Tidak konsistennya Pasal 87 Ayat (5) pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang tidak menentukan regulasinya kedalam Peraturan Bupati sehingga terjadi kekosongan hukum.

Berpangkal pada uraian tersebut di atas maka menurut penulis, tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata yang dalam hal ini Bupati Lembata adalah membentuk Peraturan Bupatinya. Kewenangan membentuk Peraturan Bupati ini berdasar pada amanat Pasal 18 Ayat 6 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

<sup>22</sup> Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono, *op cit.*, hlm. 34.

<sup>23</sup> Joi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 171.

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 6.

Peraturan Bupati yang dimaksud adalah sebagai regulasi dari Pasal 87 Ayat (5) pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pembuatan Peraturan Bupati ini pun harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dimaksud agar kelainan pada Pasal 87 Ayat (5) pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini tidak terulang lagi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 35 Huruf A menentukan bahwa dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi. Sedangkan Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dari kedua pasal tersebut jelas menentukan bahwa dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Proses pembentukan Peraturan Bupati dalam mengatur Pemeriksaan Lapangan ini harus mencakup beberapa tahapan seperti yang diuraikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tahapan di dalam penyusunan Peraturan Bupati yang dimaksud adalah: *“Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahaan atau penetapan dan pengundangan”*

Pasal 1 Angka 2 menentukan bahwa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Ada lima (5) tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau legislasi di Indonesia, yang meliputi:<sup>26</sup>

1. Perencanaan;

Tahap perencanaan merupakan proses, perbuatan atau cara merencanakan peraturan perundang-undangan. Merencanakan adalah kegiatan untuk membuat konsep dan merancang peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

2. Penyusunan;

Tahap penyusunan merupakan tahap untuk menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan. Penyusunan itu, dimulai dari penyusunan:<sup>27</sup>

1. Naskah akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>28</sup>

2. Landasan filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

<sup>26</sup> Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono, *op cit.*, hlm. 37.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>28</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

<sup>29</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab IV tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.*

### 3. Landasan yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>30</sup>

### 4. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>31</sup>

### 5. Substansi

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*



pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

#### 6. Penutup.

Pada bagian penutup terdiri atas sub tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan saran memuat antara lain perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya, rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

#### 3. Tahap pembahasan;

Tahap pembahasan merupakan untuk mengupas, membicarakan, memperdebatkan, mengkritik dan membantahi peraturan perundang-undangan yang telah disusun.

4. Tahap pengesahan atau penetapan;

Tahap pengesahan atau penetapan adalah merupakan tahap untuk menyatakan, mengakui, membenarkan dan menetapkan (tidak berubah, meneguhkan dan menguatkan) peraturan perundang-undangan.

5. Tahap pengundangan.

Tahap pengundangan merupakan tahap penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 35 Huruf A menentukan bahwa dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi. Sedangkan Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dari kedua pasal tersebut jelas menentukan bahwa dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Persoalan hukum yang terjadi di Kabupaten Lembata ini adalah terjadinya kekosongan hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 87 Ayat (4) dan (5) yang tidak melaksanakan amanat dari Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan yang mengatur tentang pemungutan BPHTB ini sudah ada tetapi tidak memadai dikarenakan belum dibentuknya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dan bagi Wajib Pajak itu sendiri dalam hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap BPHTB.

Perlunya dibentuk Peraturan Bupati oleh Bupati Kabupaten Lembata adalah untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum yang terjadi Pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.

Berdasarkan uraian di atas maka proses pembentukan Peraturan Bupati dalam mengatur Pemeriksaan Lapangan terhadap BPHTB itu harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>32</sup> beserta Penjelasannya dan Lampiran I dan Lampiran II dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah<sup>33</sup> beserta Penjelasannya dan Lampiran I, II dan III, sehingga pembentukan Peraturan Bupati nantinya dapat memberi kepastian hukum dan terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan peraturannya.

Akibat hukum tidak dibentuknya Peraturan Bupati dalam Pemeriksaan Lapangan menyebabkan Kekosongan hukum yang terjadi pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini seharusnya Bupati Lembata bisa melakukan diskresinya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan. Diskresi yang dimaksud bertujuan untuk memberi payung hukum kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sehingga terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan selama belum dibentuknya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemeriksaan Lapangan.

---

<sup>32</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

<sup>33</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015.

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>34</sup> menyatakan Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Bupati Kabupaten Lembata berhak menggunakan diskresinya dalam mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan Pemeriksaan Lapangan dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 22 sampai dengan 32 yang dimaksud, maka tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata yang dalam hal ini Bupati Lembata dalam mengisi kekosongan hukum yang terjadi pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah melakukan diskresi. Diskresi yang dilakukan oleh Bupati ini ditujukan ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan. Dalam melakukan diskresi tersebut pun Bupati Kabupaten Lembata harus memperhatikan aturan yang mengatur tentang diskresi pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Diskresi yang dilakukan ini dengan harapan dapat mengisi kekosongan norma yang ada pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sehingga memberi rasa kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan pemungutan dan

---

<sup>34</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

<sup>35</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

pemeriksaan terhadap BPHTB, karena jika tidak maka terjadi konflik dalam sistem perpajakan di Kabupaten Lembata.

### **Simpulan**

Pengkajian terhadap kekosongan hukum dalam Pemeriksaan Lapangan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lembata menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum tidak dibentuknya Peraturan Bupati dalam Pemeriksaan Lapangan seperti yang diamanatkan pada Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 87 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah memberi peluang bagi Wajib Pajak yang tidak beritikad baik dapat mempermainkan harga transaksi dan harga pasar dan memungkinkan untuk bekerjasama dengan oknum dari instansi terkait yang tidak beritikad baik melakukan penggelapan atau memanipulasi data dalam pemungutan BPHTB. Hal ini jelas yang rugi adalah Pemerintah Kabupaten Lembata sendiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu akibat hukum yang timbul adalah Bupati Lembata telah melanggar sumpah jabatannya yang di atur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketika sumpah jabatan ini dilanggar maka Bupati Lembata dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Bupati yang sudah ditentukan kewajibannya dalam Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah wajib membentuk peraturan bupati yang mengatur tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan guna Instansi terkait yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai payung hukum dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, guna menguji kepatuhan dari Wajib Pajak.
2. Mengacu pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Bupati Kabupaten Lembata berhak menggunakan diskresinya sebagai tindakan hukum dalam mengisi

kekosongan hukum terhadap pengaturan Pemeriksaan Lapangan BPHTB dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 22 sampai dengan 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata yang dalam hal ini Bupati Lembata dalam mengisi kekosongan hukum yang terjadi pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah melakukan diskresi. Diskresi yang dilakukan oleh Bupati ini ditujukan ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan. Dalam melakukan diskresi tersebut pun Bupati Kabupaten Lembata harus memperhatikan aturan yang mengatur tentang diskresi pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Terbaru. Cetakan I, Bandung: Rafika Aditama, 2003.
- Ishaq, S.H., M.Hum., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan ke dua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Panjaitan, Saut P. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Jakarta: Rafika Aditama, 2009.
- Budiono, Rachmad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1987.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Winardi, Didik Sukriono dan Sirajuddin. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan*. Malang: Setara Pers, 2011.
- Pandu Wicaksono dan Wirawan B. Ilyas. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang *Perubahan*

*Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.*